

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, dan juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga Indonesia pantas disebut sebagai Negara yang memiliki kekayaan akan Sumber Daya Alam serta Sumber Daya Manusia. Hal ini seharusnya bisa memberikan dampak positif dalam perekonomiannya. Namun faktanya, saat ini warga Indonesia banyak yang tidak memiliki pekerjaan (tuna karya), atau biasa disebut pengangguran. Masalah pengangguran merupakan masalah yang sering dihadapi oleh Negara berkembang, sama halnya yang terjadi di Indonesia. Secara umum masalah pengangguran muncul karena tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja tersebut. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai akan memicu krisis ekonomi, krisis ekonomi pun akan memicu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawannya. Dalam skala kecil pengangguran menjadi permasalahan pokok diantaranya meningkatnya angka kemiskinan, berkembangnya kejahatan, bertambahnya anak jalanan yang putus sekolah dan menurunnya tingkat pendidikan. Dari

jumlah pengangguran dalam suatu Negara dapat dilihat kondisi ekonomi pada Negara tersebut apakah berkembang, lambat ataupun mundur. Adanya masalah pengangguran menyebabkan penurunan produktivitas dan pendapatan bagi masyarakat, serta menimbulkan kesenjangan dan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Masalah pengangguran di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Mengingat masih adanya jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2017, pada tahun 2012 angka pengangguran mencapai angka 6,13 juta jiwa, tahun 2013 angka pengangguran meningkat mencapai angka 6,17 juta, tahun 2014 menurun mencapai angka 5,94 juta jiwa, tahun 2015 meningkat mencapai angka 6,18 juta jiwa dan pada tahun 2016 menurun mencapai angka 5,61 juta jiwa.

Berdasarkan data tersebut diketahui jumlah pengangguran di Indonesia selama tahun 2012 sampai dengan 2016, bahwa tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah pengangguran sebanyak 6,18 juta jiwa dan jumlah pengangguran terendah pada tahun 2016 dengan jumlah pengangguran sebanyak 5,61 juta jiwa.

Masalah pengangguran hampir dialami oleh seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia, tidak terkecuali pengangguran di Kota Blitar. Tingginya jumlah pengangguran yang terjadi di Kota Blitar salah satunya disebabkan karena banyaknya warga Kota Blitar yang telah menyelesaikan studinya di Luar

Kota kemudian kembali ke Kota Blitar untuk mencari pekerjaan di Kota Blitar. Adapun jumlah pengangguran yang ada di Kota Blitar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Blitar tahun 2017 antara lain, pada tahun 2012 jumlah pengangguran di Kota Blitar mencapai 2.439 jiwa, tahun 2013 jumlah pengangguran di Kota Blitar mengalami kenaikan sebesar 1.797 jiwa yaitu mencapai angka 4.236 jiwa, tahun 2014 jumlah pengangguran di Kota Blitar mengalami penurunan sebesar 273 jiwa yaitu mencapai angka 3.963 jiwa, dan tahun 2015 jumlah pengangguran di Kota Blitar mengalami penurunan lagi sebesar 1.097 jiwa yaitu mencapai angka 2.866 jiwa.

Berdasarkan data pengangguran di Kota Blitar menggambarkan bahwa jumlah pengangguran di Kota Blitar menurun. Namun, jumlah angkatan kerja dan usia kerja semakin tahun terus meningkat. Sedangkan, jumlah masyarakat yang sudah berkerja masih jauh dibawah jumlah angkatan kerja dan usia kerja. Sehingga masih banyak ditemukan pengangguran di Kota Blitar. Berikut disajikan data jumlah usia kerja, jumlah angkatan kerja dan jumlah bekerja di Kota Blitar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Blitar tahun 2017, tahun 2012 jumlah usia kerja sebesar 102.385 jiwa, jumlah angkatan kerja sebesar 66.293 jiwa dan jumlah bekerja sebesar 63.854 jiwa; tahun 2013 jumlah usia kerja sebesar 103.119 jiwa, jumlah usia kerja sebesar 68.609 jiwa, dan jumlah bekerja sebesar 64.373 jiwa; tahun 2014 jumlah usia kerja sebesar 104.376 jiwa, jumlah angkatan kerja sebesar 69.365 jiwa dan jumlah bekerja sebesar 66.402 jiwa; dan tahun 2015 jumlah usia kerja sebesar

105.681 jiwa, jumlah angkatan kerja sebesar 75. 516 jiwa dan jumlah bekerja sebesar 72.650 jiwa.

Berdasarkan uraian data jumlah usia kerja, jumlah angkatan kerja dan jumlah bekerja di Kota Blitar dapat dijelaskan bahwa usia kerja yang merupakan penduduk yang telah berusia minimal 15 tahun sampai dengan 65 tahun dan angkatan kerja yang berarti penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Kedua hal tersebut dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun tidak diimbangi dengan jumlah bekerja. Hal ini berarti bahwa masih banyak pengangguran yang ada di Kota Blitar.

Masalah pengangguran di Kota Blitar tidak lepas kaitannya dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh. Pendapatan menjadi pemicu utama masyarakat untuk bekerja. Semakin banyak lapangan kerja yang tersedia akan mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat. Selain bergantung pada lapangan pekerjaan, tinggi rendahnya pendapatan masyarakat juga dipengaruhi bagaimana kemampuan keluarga untuk mengelola pendapatan yang diterimanya. Pengalaman dan keterampilan juga mempengaruhi pendapatan dari masyarakat, karena semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang akan lebih berpeluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih, serta keterampilan yang mampu untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai jual akan menambah pendapatannya.

Pendapatan masyarakat Kota Blitar setiap tahunnya juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dengan melalui beberapa pendekatan. Perhitungan PDRB menggunakan 2 macam harga yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lain. Berikut akan disajikan pendapatan masyarakat Kota Blitar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Blitar tahun 2017, pendapatan masyarakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga berlaku pada tahun 2012 mencapai angka Rp 3.545.807,00; tahun 2013 mencapai angka Rp 3.929.509,00; tahun 2014 mencapai angka Rp 4.354.056,00; dan tahun 2015 mencapai angka Rp 4.819.089,00. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2012 mencapai angka Rp 3.236.606,00; tahun 2013 mencapai angka Rp 3.446.832,00; tahun 2014 mencapai angka Rp 3.694.547; dan tahun 2015 mencapai angka Rp 3.856.989,00.

Berdasarkan uraian data pendapatan masyarakat dari Badan Pusat Statistik Kota Blitar dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat setiap

tahunnya selalu mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan masyarakat Kota Blitar terjadi karena jumlah masyarakat yang bekerja juga terus meningkat setiap tahunnya, walaupun kenaikannya tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja dan usia kerja.

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada diperlukan peran serta Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk mengembangkan potensi masyarakat Kota Blitar. Supaya kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Selain untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, hal ini juga berpengaruh pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar. Penilaian kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan pada perusahaan, hal ini terjadi karena kinerja keuangan pada pemerintah daerah tidak menghitung laba atau rugi yang diperoleh. Meskipun ada istilah surplus atau defisit pada penilaian kinerja keuangan pada pemerintah daerah hal ini untuk menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja. Penilaian kinerja keuangan pada pemerintah daerah merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Kinerja keuangan Kota Blitar pada tahun 2016 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini berarti bahwa kinerja keuangan Kota Blitar sudah baik.

Pemerintah juga terus berupaya melakukan pengentasan pengangguran untuk masyarakat Kota Blitar. Banyak program yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kota Blitar. Dengan memberikan pelatihan kerja serta kursus-kursus bagi masyarakat yang tidak bekerja. Dengan harapan jumlah pengangguran di Kota Blitar bisa berkurang. Supaya kinerja keuangan Kota Blitar lebih baik lagi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Blitar juga tercapai. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengangguran dan Pendapatan Masyarakat Kota Blitar”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas tingkat pengangguran di Kota Blitar yang masih meningkat setiap tahunnya, karena jumlah angkatan kerja dan usia kerja yang terus mengalami peningkatan tanpa diimbangi dengan jumlah bekerja di Kota Blitar. Sedangkan pendapatan masyarakat yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Serta kinerja keuangan pemerintah yang dalam laporan realisasi anggaran, pendapatannya selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Bagaimana hal ini bisa terjadi apabila angka pengangguran yang ada masih terus meningkat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan diatas, terdapat masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini, yaitu bagaimana analisa

kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat pengangguran dan pendapatan masyarakat di Kota Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat pengangguran dan pendapatan masyarakat di Kota Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan pada akhirnya, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut,

1. Bagi penulis,

Penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan tugas akhir. Serta penelitian ini diharapkan, penulis dapat lebih memahami permasalahan baik secara teoritis maupun aplikasinya dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Blitar,

Hasil penelian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisis korelasional kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat pengangguran dan pendapatan masyarakat di Kota Blitar dan

pengambilan keputusan pada Pemerintah Daerah Kota Blitar serta instansi terkait.

3. Bagi penelitian selanjutnya,

Hasil dari penelitian diharapkan digunakan sebagai referensi bagi penelitian lainnya dan juga mendorong timbulnya penelitian selanjutnya.